

## ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)

*Umi Yunianti*  
*Universitas PGRI Yogyakarta*

### *Abstract*

*This study aims to determine efficiency and effectiveness of budget revenue and expenditure of the village (APBDesa) Argodadi village, Sedayu sub-district, Bantul district in the 2010 - 2013 budget period.*

*This research is a qualitative descriptive study. The data used is primer data and secondary data. The data technique used is the ratio analysis technique to measure the financial performance of government.*

*This result showed the efficiency ratio of financial village on average is at 103,12% with a not efficient category of the year 2010 - 2013. The effectiveness ratio of financial village on average is at 125,75% with a tendency to be very effective category of the year 2010 - 2013. The efficiency of organizing APBDesa showed the result not efficient, but the effectiveness of organizing APBDesa is very effective.*

**Keywords:** *APBDesa, efficiency, and effectiveness*

### **Pendahuluan**

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Daerah mempunyai kewenangan dan tanggungjawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Salah satu rasionalitas yang penting dari pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk memperbaiki kinerja pemerintahan kabupaten dan kota. Otonomi daerah merupakan konsep kajian aktual yang memberikan porsi lebih kepada daerah untuk menyalurkan segala urusan dan kepentingan daerah agar mampu dikelola sendiri sesuai dengan potensi masing-masing daerah yang berbeda-beda.

Provinsi, kabupaten/kota, desa adalah kategori daerah otonom mulai dari tingkat teratas sampai terbawah yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat tempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan Permendagri No. 37 tahun 2007, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan ditetapkan dengan peraturan desa. Desa yang

merupakan daerah otonom terendah, otomatis akan menjadi objek dari berlangsungnya sistem desentralisasi fiskal yang diperoleh dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijaksanaan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). APBDesa adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun.

Penelitian mengenai keterkaitan anggaran dengan kinerja instansi sektor publik sudah banyak dilakukan sebelumnya. Nugrahani (2007) meneliti tentang analisis penerapan konsep *value for money* pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Bisma dan Susanto (2010) meneliti evaluasi kinerja keuangan daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2003-2007. Kurrohman (2013) meneliti tentang evaluasi penganggaran berbasis kinerja melalui kinerja keuangan yang berbasis *value for money* di Kabupaten/kota di Jawa Timur.

Furciani (2010), meneliti tentang pengelolaan keuangan desa dalam mewujudkan *good governance*, penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi terjadi hanya ketika perencanaan saja. Hampir semua proses tidak memenuhi prinsip tanggungjawab karena ada beberapa hal dalam proses yang tidak sesuai dengan Permendagri No.37/2007. Akuntabilitas sangat rendah karena tanggung jawab tidak melibatkan masyarakat dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Menurut Mardiasmo (2009), efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan

menggunakan perbandingan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dalam APBDesa dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional akan dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*).

### Kajian Teori

Menurut Mardiasmo (2009), anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metoda untuk mempersiapkan anggaran.

Sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006, efisiensi adalah hubungan antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*), efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintahan untuk mencapai tujuan organisasi perangkat pemerintahan dapat mencapai manfaat tertentu. *Input* adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. *Output* adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non-fisik.

Pengertian efektivitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, atau efektivitas dari pemerintah daerah adalah bila tujuan pemerintah daerah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006, efektivitas adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil (*output-outcome*). *Outcome* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.

Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan danayang serendah-rendahnya. Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit

organisasi dan keluaran yang dihasilkan (Mardiasmo, 2009). Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik sebuah hipotesis:

**H1:** Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Argodadi tahun anggaran 2010-2013 pada kriteria efisien.

Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang hams dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir (*spending wisely*) (Mardiasmo, 2009). Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik sebuah hipotesis:

**H2:** Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Argodadi tahun anggaran 2010-2013 pada kriteria efektif.

### Metode Penelitian

#### Pengumpulan Data dan Subjek Penelitian

Metode pengumpulan data penelitian ini adalah dengan melakukan observasi dan wawancara. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Subjek penelitian ini adalah APBDesa Argodadi Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul.

#### Definisi Variabel dan Pengukuran Variabel

Efisiensi berarti tingkat pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu. Efisiensi dapat menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah akan dikatakan efisien bila rasio antara 60,01% s/d 80%, semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja akan semakin baik dan semakin besar rasio berarti semakin buruk.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Relasi Belanja Daerah}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Efektivitas berarti tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan pendapatan asli daerah dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil. Kinerja pemerintah akan dikatakan efektif

bila rasio antara 90,01% s/d 100%, semakin tinggi rasio efektivitas berarti kinerja akan semakin baik dan semakin rendah rasio efektivitas berarti semakin buruk.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi P A D}}{100\% \text{ Target PAD}} \times \text{berdasar potensi iil}$$

## Analisis Data

### 1. Rasio Efisiensi

Pengukuran tingkat efisiensi APBDesa Argodadi tahun anggaran 2010 – 2013 diketahui melalui rasio antara realisasi Belanja Desa dengan realisasi Pendapatan Desa.

**Tabel 1. Rasio Efisiensi APB Desa Argodadi Tahun 2010 – 2013**

Tahun	Belanja (Rp)	Pendapatan (Rp)	Rasio (%)
2010	751.121.904	700.132.906	107,28
2011	628.266.168	603.166.762	104,16
2012	847.212.935	838.162.935	101,07
2013	677.131.600	677.131.600	100
<b>Rata-rata</b>	<b>725.933.151,8</b>	<b>704.648.550,8</b>	<b>103,12</b>

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil analisis efisiensi pada tabel 1 selama periode tahun anggaran 2010 – 2013, tingkat efisiensi dari APB Desa Argodadi memiliki kecenderungan *tidak efisien*, dengan rata-rata tingkat efisiensi diatas 100% yaitu sebesar 103,12%.

### 2. Rasio Efektivitas

Pengukuran tingkat efektivitas APBDesa Argodadi tahun anggaran 2010 – 2013 diketahui melalui rasio antara realisasi Pendapatan Asli Desa (PADesa) dengan Hasil Kekayaan Desa.

**Tabel 2. Rasio Efektivitas APBDesa Argodadi Tahun 2010 -2013**

Tahun	PADesa (Rp)	Hasa Kekayaan Desa	Rasio (%)
2010	231.446.650	203.510.650	113,72
2011	170.017.160	135.617.160	125,36
2012	221.922.935	188.522.935	117,71
2013	214.756.600	155.356.600	138,23
<b>Rata-</b>	<b>209.535.836,3</b>	<b>170.751.836,3</b>	<b>123,75</b>

Sumber: Data diolah

Dari hasil perbandingan PADesa dan Hasil kekayaan desa pada tabel 2 selama periode tahun anggaran 2010 – 2013, APBDesa memiliki kecenderungan sangat efektif, dengan rata-rata tingkat efektif diatas 100% yaitu sebesar 123,75%.

### Perkembangan Kinerja Keuangan

Pengukuran perkembangan kinerja keuangan pemerintah desa Argodadi tahun anggaran 2010 – 2013 diketahui melalui rasio efisiensi dan rasio efektivitas tahun bersangkutan dikurangi dengan rasio tahun sebelumnya dibagi dengan rasio tahun sebelumnya, sehingga menunjukkan tingkat perkembangan kinerja keuangan Pemerintah Desa Argodadi.

**Tabel 3. Perkembangan Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Argodadi Tahun 2010-2013**

Kinerja Keuangan	2010	2011	2012	2013
		Naik*/Turun	Naik*/Turun	Naik*/Turun
Rasio	107,28	2,90%	2,96%	1,05%
Rasio Efektivitas	113,72%	10,23%*	6,10%	17,43%*

Sumber: Data diolah

Perkembangan kinerja keuangan APBDesa Argodadi dilihat dari rasio efisiensi dan rasio efektivitas berfluktuatif dari tahun ke tahun. Dari segi efisiensi perkembangan kinerja keuangan mengalami penurunan, yang berarti tingkat efisiensi lebih baik, karena semakin rendah rasio efisiensi menunjukkan kinerja yang lebih baik. Dari segi efektivitas perkembangan kinerja keuangan mengalami kenaikan pada tahun 2011 sebesar 10,23% dan pada tahun 2013 sebesar 17,43% yang berarti tingkat efektivitas semakin baik, karena semakin tinggi kenaikan rasio menunjukkan perkembangan kinerja yang yang lebih baik. Apabila rasio mengalami penurunan setiap tahunnya menunjukkan bahwa perkembangan kinerja keuangan yang tidak baik.

### Pembahasan

Hasil analisa efisiensi tahun 2010 – 2012 pada tabel 1 menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan APBDesa pemerintah desa Argodadi dengan perbandingan belanja dan pendapatan tidak efisien, pada tahun 2010 sebesar 107,28%, pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 104,16%, pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 101,07%, sedangkan untuk tahun anggaran 2013 turun

menjadi 100% menunjukkan kinerja yang kurang efisien. Kecenderungan yang tidak efisien pada dasarnya adalah suatu pemborosan, dimana dalam memperhitungkan alokasi keuangan yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan aktivitas pemerintah desa tidak cermat dalam mengkalkulasi kapasitas keuangan desa serta tingkat prioritas pendanaan, sehingga pencapaian sasaran tidak optimal.

Selama periode tahun anggaran 2010 – 2013, rata-rata tingkat efisiensi APBDesa Argodadi memiliki kecenderungan tidak efisien, dengan tingkat efisiensi diatas 100% yaitu sebesar 103,12%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja APBDesa Argodadi dalam kriteria tidak efisien, sehingga hipotesis pertama bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Argodadi tahun 2010 - 2013 pada kriteria efisien tidak terdukung.

Berdasarkan tabel 3, perkembangan kinerja keuangan APBDesa dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi terus mengalami penurunan setiap tahun, pada tahun 2010 - 2011 turun sebesar 2,90%, pada tahun 2011 - 2012 turun sebesar 2,96%, dan pada tahun 2012 - 2013 turun sebesar 1,05%, hal tersebut menunjukkan keadaan yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan desa meskipun APBDesa belum dapat dikatakan cukup atau efisien.

Berdasarkan pada tabel 2, hasil perhitungan perbandingan PADesa dan Hasil Kekayaan Desa, maka rasio efektivitas APBDesa dapat diketahui. Rasio efektivitas APBDesa untuk tahun 2010 sebesar 113,72%, untuk tahun 2011 rasio naik menjadi 125,36%, untuk tahun 2012 rasio turun menjadi 117,71%, dan untuk tahun 2013 naik menjadi 138,23%. Secara rata-rata kecenderungan efektivitas PADesa Desa Argodadi dari tahun 2010 - 2013 sebesar 123,75% pada kategori sangat efektif. Hal itu menunjukkan bahwa kinerja APBDesa Argodadi dalam kriteria sangat efektif. Sehingga hipotesis kedua ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Argodadi tahun 2010 - 2013 pada kriteria efektif positif terdukung.

Dari tingkat efektivitas perkembangan kinerja keuangan APBDesa dapat disimpulkan bahwa perkembangan kinerja keuangan berfluktuatif selama 4 (empat) tahun. Pada tahun 2010 - 2011 naik sebesar 10,23%, pada tahun 2011 - 2012 turun sebesar 610%, dan pada tahun 2012 - 2013 naik sebesar 17,43%, hal tersebut menunjukkan perkembangan yang baik dalam pengelolaan keuangan desa.

## Kesimpulan

Pelaksanaan otonomi desa mendorong pemerintah dan masyarakat desa untuk lebih mandiri dalam mengatur dan mengurus rumah tangga desa, termasuk dalam hal ini adalah mengatur dan mengurus Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDesa), dan Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang sangat penting dalam pembangunan desa dan bagi pelaksanaan otonomi desa. Oleh karena itu, penting adanya penguatan peran lembaga-lembaga di desa dalam penyelenggaraan pembangunan.

Berdasarkan hasil analisis data terhadap efisiensi dan efektivitas APBDesa Desa Argodadi tahun anggaran 2010 - 2013, dapat disimpulkan bahwa efisiensi kinerja keuangan tahun 2010 - 2012 memiliki kecenderungan tidak efisien, sedang pada tahun 2013 pada kriteria kurang efisien. Dan secara keseluruhan kinerja keuangan tidak efisien dengan rata-rata tingkat efisiensi diatas 100% yaitu sebesar 103,12%. Efektivitas kinerja keuangan tahun 2010 -2013 memiliki kecenderungan sangat efektif yaitu dengan rata-rata tingkat efektivitas sebesar 123,75%.

Berdasarkan naik-turunnya perkembangan kinerja keuangan APBDesa Argodadi menunjukkan bahwa kinerja pendapatan berfluktuatif selama 4 (empat) tahun. Apabila dilihat dari rasio efisiensi perkembangan kinerja keuangan pemerintah desa menunjukkan penurunan setiap tahun, tahun 2011 turun 2,90%, tahun 2012 turun 2,96%, dan tahun 2013 turun 1,05%. berdasarkan rasio efektivitas, maka perkembangan kinerja keuangan pemerintah desa desa Argodadi sangat baik, karena pada tahun 2011 mengalami peningkatan 10,23% dan pada tahun 2013 meningkat 17,43%.

## Saran

Pemerintah desa dalam merencanakan anggaran, terlebih dahulu memperhitungkan efisiensi dan efektivitas atas dana yang akan dikelola, agar antara penggunaan dana dan tujuan pembangunan desa dapat tercapai maksimal.

Bagi pemerintah desa sebaiknya dalam menyusun dan merealisasikan APBDesa perlu memperhatikan rasio-rasio keuangan untuk periode berikutnya sehingga dapat meningkatkan pendapatan desa, pelayanan publik, pembangunan desa, dan mampu mensejahterakan masyarakat.

**Daftar Pustaka**

- Bastian, Hendra. 2010. *Akuntansi Sektor Pubhk Suatu Pengantar*. Edisi ketiga. Jakarta : Erlangga.
- Bisma dan Susanto. 2010. *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007*. Ganec Swara Edisi Khusus, Vol. 4 No. 3, Desember 2010.
- Furgani, Astri. 2010. *Tesis: Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Good Governence (Studi Pada Pemerintahan Desa Kalimo'o Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep)*. Jatim: UPN.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Pubhk-Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim dan Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Pubhk – Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamid, Abdul. 2011. *Otonomi Daerah Dan Kuahtas Pelayanan Publik*. Jurnal ACADEMICA Fisip Untad, Vol. 03 NO 01 Pebruari 2011.
- Hudayana, Bambang, dan Tim Peneliti FPPD, 2005, "Peluang Pengembangan Partisipasi Masyarakat melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa, Pengalaman Enam Kabupaten", Makalah disampaikan pada Pertemuan Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) di Lombok Barat 27-29 Januari 2005.
- Kurrohman, Taufik. 2013. *Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja Melalui Kinerja Keuangan Yang Berbasis Value For Money Di Kabupaten/Kota Di Jawa Timur*. Jurnal Dinamika Akuntansi, Vol.5, No. 1, Maret 2013 pp 1-11.
- Liando, Saerang, dan Elim. 2014. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Menggunakan Metode Value For Money*. Jurnal EMBA, Vol. 2 No.3 September 2014.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Misbahul Anwar, Bambang Jatmiko (2014). *Kontribusi Dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Yang Transparan Dan Akuntabel (Survei Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta)*. Jurnal AKMENIKA Vol 11. No.1(387-466) Yogyakarta. ISSN 1978-1679
- Nugrahani, T. S. 2007. *Analisis Penerapan Konsep Value for Money pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta*. AKMENIKA UPY, Vol.1, 2007.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2009 tentang *Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang *Pedoman Pegelolaan Keuangan Desa*.
- Ratminto dan Winarsih, Atik Septi. 2007. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Shim and Siegel. 2000. *Accounting Handbook*. Barron's Educational Series. USA: New York.
- Sumenge, A. S. 2013. *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan*. Jurnal EMBA, Vol. 1, No. 3, September 2013, Hal. 74-81.
- Susanto. 2010. *Reinvensi Pembangunan Ekonomi Daerah, Bagaimana Membangun Kesejahteraan Daerah*. Jakarta: Esensi Erlangga Group.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*
- Widjaja,HAW. 2005. *Otonomi Desa (Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.